

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN *COVID-19*
(STUDI KASUS DI SDN KARANGREJO 02 KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER)**

***IMPLEMENTATION OF EDUCATION POLICY
IN THE EMERGENCY OF THE SPREAD OF COVID-19
(CASE STUDY AT SDN KARANGREJO 02 SUMBERSARI DISTRICT,
JEMBER REGENCY)***

Handiarto¹⁾, Retno Setyo Pertiwi.²⁾, Sigit Kariyanto³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moch. Soedji Jember

¹Email : handiarto04@gmail.com

Naskah diterima tanggal 18-07-2022, direvisi tanggal 20-07-2022, disetujui tanggal 30-07-2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan pada masa darurat penyebaran *Covid-19* di SDN Karangrejo 02 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Penelitian dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus 2021. Informan terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, Wali Siswa dan Siswa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Alat analisis yang digunakan adalah model Implementasi Kebijakan George Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi Kebijakan Pendidikan Pada Masa Darurat Penyebaran *Covid-19* di SDN Karangrejo 02 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember berjalan relatif baik.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pembelajaran Jarak Jauh, *Covid-19*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of educational policies in the emergency period for the spread of Covid-19 at SDN Karangrejo 02, Sumbersari District, Jember Regency. The research was conducted between June and August 2021. Informants consisted of the Principal, Teachers, Guardians of Students and Students. This research uses descriptive qualitative method. The analytical tool used is the George Edward III Policy Implementation model. The results showed that: Implementation of Educational Policies During the Emergency Period, the spread of Covid-19 at SDN Karangrejo 02, Sumbersari District, Jember Regency went relatively well.

Keywords: Policy Implementation, Distance Learning, *Covid-19*

PENDAHULUAN

Kesehatan lahir batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah terkair penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* merupakan dasar pertimbangan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang

pelaksanaan kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Menindak lanjuti Surat Edaran tersebut, Bupati Jember pada tanggal 24 Maret 2020 mengeluarkan Surat Edaran dengan no surat 420/686/310/2020 perihal Kebijakan Pendidikan dalam masa Darurat penyebaran *Covid-19*. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Kepala Sekolah Dasar, seluruh Kepala Sekolah Menengah Pertama baik Negeri maupun Swasta, seluruh Kepala/Pengelola PKBM Penyelenggara Program Kesetaraan dan seluruh Kepala Sekolah/Pengelola Satuan PAUD (TK, KB, TPA) Negeri/Swasta. Yang berisi antara lain tentang kegiatan pembelajaran di rumah bagi para peserta didiknya. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
- b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi *Covid-19*;
- c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
- d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Setelah kebijakan publik ditetapkan langkah berikutnya yang mendesak adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut (Van Meter, dan Van Horn, dalam Winarno, 2002). Udoji (dalam Wahab, 2008: 45) mengatakan bahwa : “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapih dalam arsip jika tidak

diimplementasikan”. Sementara Grindle (dalam Wahab, 2000: 45), berpendapat bahwa pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik tidak sekedar menerjemahkan keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui jalur birokrasi, tetapi juga menyangkut keputusan siapa mendapatkan apa dari kebijakan tersebut, serta mengantisipasi apa yang harus dilakukan bila terdapat konflik dalam implementasi kebijakan

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Kusnandar, 2012: 104-109) ditentukan oleh adanya; 1) Faktor komunikasi, yakni kejelasan yang harus disampaikan oleh pelaksana kebijakan. 2) Sumber daya adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung dan kelancaran pelaksanaan kebijakan; 3) Disposisi atau sikap pelaksanaan, yakni adanya keinginan atau kesepakatan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan; dan 4) Sistem birokrasi, yakni tata kerja dalam organisasi untuk mempermudah/memperlancar kebijakan.

Komunikasi dalam kebijakan sangat diperlukan, karena proses ini berarti pihak pembuat kebijakan menyampaikan seluruh informasi yang telah diputuskan dalam kebijakan kepada pihak implementor untuk dilaksanakan (Widodo, 2013). sementara itu Edward III (Winarno, 2002), mengatakan bahwa proses komunikasi suatu kebijakan meliputi tiga aspek, yakni aspek transmisi, aspek konsistensi, dan aspek kejelasan. Aspek transmisi berarti suatu implementasi kebijakan harus disampaikan kepada semua pihak, baik kepada implentor, kelompok sasaran, serta pihak lain yang ada kaitannya dengan dengan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan harus dilaksanakan secara konsisten dalam arti tidak mudah berubah-ubah, sehingga membingungkan para implementor maupun kelompok sasaran. Aspek kejelasan dalam implentasi suatu kebijakan sangatlah penting. Dengan kejelasan apa yang dimaksud dalam kebijakan akan mudah diterima, dipahami dan dilaksanakan secara efektif.

Ketiga aspek komunikasi yang meliputi aspek transisi, konsistensi dan kejelasan akan sia-sia bila tidak didukung oleh sumber daya, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Anggaran. SDM harus memiliki kapasitas yang memadai secara intelektual, demikian juga jumlahnya harus proporsional

(Winarno, 2002). Anggaran yang memadai dan dikelola dengan baik akan memperlancar pelaksanaan kebijakan. Disposisi, berupa keinginan, kecenderungan dan kemauan pelaksana kebijakan yang sungguh-sungguh akan memperlancar tercapainya tujuan kebijakan (Widodo, 2013) disposisi atau kecenderungan seseorang untuk bersikap mendukung ataupun menolak kebijakan biasanya ditentukan apakah penerapan kebijakan tersebut menguntungkan dirinya atau tidak. Kalau kebijakan dirasa menguntungkan dirinya maka kecenderungan untuk melaksanakan kebijakan akan lebih bersemangat. Demikian juga sebaliknya. Idealnya tujuan kebijakan bisa menguntungkan para implementornya maupun organisasi.

Struktur Birokrasi berkaitan dengan hubungan kerja, kewenangan, dan tanggung jawab para personel dalam struktur organisasi. Dalam Organisasi Birokrasi biasanya terdapat pedoman mengenai prosedur kerja atau sering disebut SOP (Standar Operating Prosedur), dan fragmentasi (Winarno, 2002). Dengan adanya SOP pekerjaan cenderung lebih terarah dan terkoordinasi, sedangkan fragmentasi menunjukkan kondisi sebaliknya, yaitu bentuk struktur birokrasi yang terpisah melebar yang mempersulit komunikasi dan koordinasi

Berkaitan dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan agar proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah (Minsih, Jatin Sri Nandang, 2021). Pembelajaran jarak jauh atau online adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan internet sebagai tempat menimba ilmu (Syarifudin, 2020). Hal ini didukung oleh pendapat Risalah, et al (2020) bahwa perkembangan teknologi merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Apalagi di masa pandemi *Covid-19*, media sosial dan aplikasi di *smartphone* menjadi penting untuk proses pembelajaran online. oleh karena itu sangat mudah bagi siswa dan guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh tersebut. Namun, selain menjadi jembatan ilmu di masa pandemi *Covid-19* antara guru dan siswa, kemajuan teknologi juga membutuhkan peran serta orang tua agar bisa mendampingi anaknya selama belajar di rumah (Ainur Risalah dkk., 2020).

Covid-19 telah merubah proses belajar mengajar dari tatap muka ke pembelajaran jarak jauh sebagai pilihan di tengah kondisi pandemi ini (Sabowala & Manghirmalani-Mishra, 2020; Moralista & Oducado, 2020). Pembelajaran di dalam era pandemi seperti ini membuat kita harus menyesuaikan metode belajar mengajar yang sesuai dengan situasi terkini berbasis digitalisasi dan harus dipadukan dengan metode pembelajaran tatap muka di ruang kelas maupun online/remote (Handayani & Zulaikhah, 2020).

Meskipun pembelajaran jarak jauh adalah bentuk ideal pada masa pademi, tetapi yang menjadi permasalahan adalah pembelajaran secara *offline* (pembelajaran jarak jauh) belum pernah dilakukan sebelumnya (Nuryatin, 2020), Apalagi bagi siswa sekolah dasar banyak yang belum memiliki alat komunikasi yang baik seperti *smartphone* (Nur Latifah & Supena, 2020).

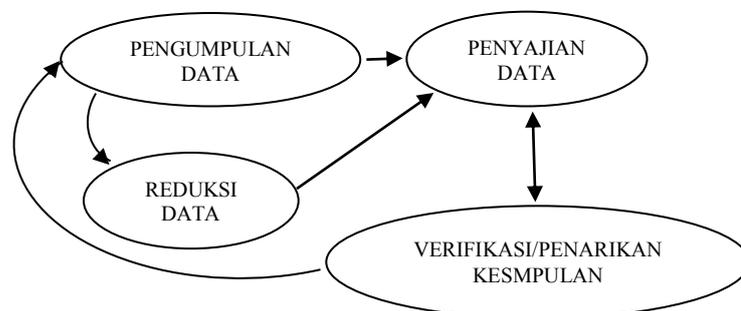
SDN Karangrejo 02 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, merupakan Sekolah Dasar Negeri yang letaknya di pinggiran Kota berbatasan dengan Desa di sebelah timur Kabupaten jember. Siswa yang menempuh pendidikan di SDN 02 Karangrejo merupakan siswa dari anak masyarakat kota dan desa, dengan tingkat ekonomi maupun budaya yang berbeda. Kondisi ini menarik untuk diteliti. Berkaitan dengan hal tersebut Penelitian ini bertujuan untuk “mendeskripsikan Implementasi Pendidikan dalam masa darurat penyebaran *Covid-19* khususnya kegiatan pembelajaran di rumah bagi para peserta didiknya di SDN Karangrejo 02 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.”

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan di SDN Karangrejo 02 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, dimulai pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Oktober 2020. Dipilihnya lokasi di SDN Karangrejo 02 karena Lembaga tersebut adalah sebagai salah satu yang menerapkan Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh berkaitan dengan *Covid-19*. Sekolah Dasar ini walau berada di Kawasan Perkotaan tepatnya pinggiran Kota, maka heterogenitas budaya dan tingkat ekonomi masyarakat sekitar cukup tinggi. Kondisi tersebut diduga akan

berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pada prosesnya, penelitian ini mengumpulkan data dari sumber data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: peneliti sendiri, panduan wawancara (*interview guide*) dan catatan lapangan (*field note*). Untuk menentukan informan, Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang meliputi Kepala Sekolah, Guru, Siswa dan Wali Murid. Informasi yang telah diperoleh dari informan tersebut kemudian diperiksa kebenarannya dengan menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Gambar 1) yang dipopulerkan oleh Miles dan Huberman.



Gambar 1. Teknik Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

SDN Karangrejo 02 berdiri tahun 1980, beralamat di Jl. Sriwijaya No. 19 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Summersari – Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Jumlah Murid tahun 2021 sebanyak 374 murid dengan Rombongan Belajar 13 kelas.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus kajian yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. (Widodo, 2010: 85)

SDN Karangrejo 02 melalui Kepala Sekolah sebagai Pemimpin di tingkat

sekolah, telah mengimplementasikan kebijakan Belajar dari Rumah. Pelaksanaan Belajar Jarak Jauh (BDR) menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam dua pendekatan yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Media yang sering digunakan dalam pembelajaran Luring adalah modul belajar sendiri dan lembar kerja, dan terkadang peserta didik didorong untuk menyaksikan program TVRI yang secara khusus menayangkan program PJJ.

Virus *Covid-19* mengharuskan peserta didik tetap di rumah, di lain sisi hak peserta didik untuk mendapatkan layanan Pendidikan yang layak harus pula terlayani. Dilema dalam masa pandemik yang mendasari kebijakan pemerintah tentang Belajar di Rumah harus diimplementasikan secara efektif,

Tahap implementasi kebijakan harus dipersiapkan secara baik, bila tidak maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan (Widodo, 2010: 85) menurut Van Matter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2014: 627), bahwa Implementasi kebijakan sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar- lembaga terkait, seperti dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan di sekolah untuk dan bagi keberhasilan suatu program tersebut.

Menurut Edward III (dalam Kusnandar, 2012: 104-109) efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah faktor penting bagi kehidupan organisasi. Komunikasi harus berjalan dua arah, artinya ada kesamaan persepsi antara atasan dan bawahan sehingga meminimalisir kesalahpahaman dalam organisasi. Terkait dengan implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di SDN Karangrejo 02, Kepala Sekolah dengan berbagai *stakeholder* yang terlibat didalamnya, seperti para guru, siswa, para orang tua siswa dan siswa itu sendiri harus dapat menjalankan tugas berupa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan intruksi pemerintah. Tentu saja dalam

pelaksanaannya tidak semudah membalikan telapak tangan, banyak sekali permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Kejelasan, transmisi dan konsistensi merupakan 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan parameter untuk melihat dimensi komunikasi ini. Terkait dengan kejelasan dalam hal pembelajaran jarak jauh atau dikenal juga dengan penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran *Virus Corona Disease (Covid-19)* di SDN Karangrejo 2 sudah cukup jelas. Pada awalnya kebijakan tersebut dianggap membingungkan untuk dilaksanakan karena belum berpengalaman. Para informan yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, dan murid sama-sama berpendapat bahwa dalam masa normal adanya pembatasan membawa *Smartphone* dalam kegiatan sekolah, tetapi pada masa pandemik penggunaan *Smartphone* tersebut justru menjadi keharusan yang harus dimiliki para peserta didik agar dapat menerima materi pembelajaran dengan baik. Komunikasi dan koordinasi dilakukan secara berkelanjutan, baik antara sesama satuan Pendidikan, dengan dinas terkait maupun dengan para wali murid.

Parameter yang kedua yaitu transmisi atau penyaluran komunikasi. Penyaluran komunikasi ini harusnya terjadi 2 (dua) arah atau *two way traffic communication*. Hal ini penting, mengingat pedoman penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh ini adalah produk yang dihasilkan oleh pemerintah pusat, akan tetapi kenyataan di lapangan situasi dan kondisi tiap daerah berbeda-beda.

Kepala sekolah menginstruksikan kepada para guru untuk mensosialisasikan Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak hanya kepada semua peserta didik, tetapi juga kepada para Orang Tua/Wali Murid. Para guru dan Kepala Sekolah banyak menerima keluhan dan aduan tentang kebijakan ini, terutama dari orang tua yang belum memiliki alat komunikasi (Gawai/ *Smartphone*) yang memadai untuk kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh. Komunikasi intensif tiga arah antara Dinas Pendidikan Daerah dengan Sekolah serta peserta didik/wali murid dapat membuahkan pemahaman bersama, sehingga proses belajar mengajar jarak jauh dapat terlaksana relatif baik.

2. Disposisi

Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition or Attitudes*) menurut Edward III (dalam Nugroho, 2014: 637), disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Dari hasil wawancara didapatkan fakta sebagai berikut, Kepala Sekolah dan para guru sebagai pihak implementor memahami dan sekaligus antusias untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh di SDN Karangrejo 02, meskipun masih ada keraguan tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari terhadap para peserta didik. Berbeda halnya dengan para peserta didik yang merasa senang belajar di rumah. Mereka beranggapan BDR adalah libur panjang yang setiap hari bisa bermain kapanpun yang mereka kehendaki, tetapi kemudian mereka akan merasa jenuh karena harus belajar di rumah secara terus-menerus. Keinginan untuk bertemu dengan teman dan guru di sekolah, merupakan hal yang mendorong rasa antusias mereka untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan pendekatan menggunakan grup *chat* aplikasi Whatsapp. Mereka bisa saling bersapa walau hanya melalui *Smartphone*.

Dari keterangan Kepala sekolah, para guru memiliki kemauan dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Para guru juga berkesungguhan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh dibuktikan dengan persiapan yang dilakukan. Berdasarkan hasil observasi pembelajaran daring yang dilakukan, para guru menggunakan aplikasi Whatsapp dan Zoom dalam pembelajaran daring. Aplikasi Whatsapp digunakan untuk berkomunikasi dengan wali murid dan pesera didik. Melalui aplikasi Whatsapp, guru memberikan arahan dan informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran daring. Whatsapp digunakan karena semua wali murid dan juga peserta didik sudah terbiasa dan mampu menggunakannya, melalui Whatsapp peserta didik atau wali murid dapat mengirimkan kembali tugas yang telah dikerjakan oleh anaknya. Sedangkan Zoom digunakan untuk proses pembelajaran daring, sehingga guru dapat menjelaskan materi kepada

peserta didik dengan mudah. Meskipun awalnya ada beberapa peserta didik yang tidak paham menggunakan Zoom, namun lambat laun mereka terbiasa dengan diajari oleh orang tua mereka. Karena rata-rata Wali Murid di kelas tersebut masih muda dan tidak gagap teknologi sehingga mampu mengajari anak mereka.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis dalam pelaksanaan pembelajaran daring terlihat guru banyak menggunakan metode ceramah dan penugasan disaat melakukan pembelajaran melalui Zoom ataupun Videocall. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik sehingga peserta didik akan lebih mudah memahami materi pembelajaran, diakhir pembelajaran para guru akan memberikan tugas sebagai latihan dari materi yang sudah dipelajari, namun tugas yang diberikan tidak seperti pada pembelajaran tatap muka. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini guru tidak dianjurkan memberikan tugas terlalu banyak kepada peserta didik, seperti memberikan tugas berjumlah lima soal.

Adanya upaya para guru dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran daring dengan penuh antusias. Disaat bersamaan mereka adalah penggerak awal dalam metode Pembelajaran Jarak Jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa sikap, kemauan dan motivasi para implementor kebijakan cukup baik.

3. Sumber Daya

Menurut Van Matter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2014: 628) bahwa dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*), sumberdaya material (*material resources*) dan sumberdaya metode (*method resources*). Sumberdaya yang paling penting dari ketiga sumberdaya tersebut adalah sumberdaya manusia karena disamping sebagai subyek implementasi kebijakan, sekaligus juga sebagai objek. Faktor sumberdaya ini memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Ini menjelaskan bahwa sejelas apapun aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta bagaimanapun akuratnya komunikasi

(sosialisasi) atas ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan kurang berkompeten dan kurang memadai untuk melakukan pekerjaannya, bukan mustahil implementasi kebijakan tidak akan efektif (Edward III dalam Nugroho, 2014: 636).

Di SDN Karangrejo 02 setidaknya terdapat 19 personel yang terlibat dalam pengelolaan proses belajar mengajar. Mulai dari Kepala Sekolah, Wali kelas, dan para guru telah berpendidikan Sarjana, hanya menyisakan Tata Usaha dan Satpam yang masih berpendidikan Sekolah Menengah Atas. Fakta di atas menunjukkan sumber daya manusia di SDN Karangrejo 02 Jember sudah memadai untuk Lembaga Pendidikan setingkat Sekolah Dasar. Kondisi ini mempermudah penerimaan mereka lebih mudah menerima inovasi pembelajaran termasuk PJJ.

Dukungan sumberdaya keuangan yang memadai dengan diperbolehkannya relokasikan Dana Bantuan Sosial untuk keperluan operasional Pembelajaran Jarak Jauh. Hal ini dapat sangat mendukung pelaksanaan kebijakan, demikian juga dengan sumber daya kewenangan. Pihak satuan Pendidikan diberi kewenangan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada.

Dengan kondisi Sumber daya kebijakan BDR dapat dengan relatif cepat dapat teralisasi secara efektif. Para siswa merasa senang dan menikmati setiap materi yang diberikannya oleh gurunya, seperti proses belajar mengajar yang dipromosikan oleh aplikasi Ruang Guru yang berbayar. Berdasarkan hasil observasi dapat dideskripsikan bahwa kemampuan sebagian besar guru terutama di SDN Karangrejo 02 sudah melaksanakan pembelajaran melalui online tapi terbatas dengan melakukan share materi pembelajaran dan memberikan tugas melalui Aplikasi Google Classroom dan Whatsapp.

Pembelajaran online tidak hanya sebatas berbagi video dan tugas, tetapi harus disertai dengan pendekatan yang mengedepankan komunikasi, kolaborasi, kritis dan kreatif. Pembelajaran Jarak Jauh masih jauh dari harapan. Sebagian besar guru memahami Pembelajaran Jarak Jauh ini sebagai

pembelajaran online atau online saja, sedangkan selain online ada juga pembelajaran offline dan blended. Realitas di lapangan masih banyak guru yang belum paham teknologi. Pembelajaran jarak jauh dianggap selesai hanya dengan memberikan materi melalui aplikasi media sosial seperti Google Classroom dan Whatsapp, tanpa penjelasan materi terlebih dahulu disertai dengan banyak tugas. Hal yang sangat disayangkan adalah banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas maupun tugas yang dikerjakan oleh orang tua siswa, sehingga penilaian menjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Pemahaman struktur birokrasi atau organisasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewenangan dan koordinasi di antara agen pelaksana (instansi) terkait dengan implementor kebijakan.

Struktur birokrasi dalam pembelajaran jarak jauh tentu saja tidak terlepas dari peran Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai *leading sector* untuk melakukan berbagai perubahan yang inovatif dan kreatif sesuai dengan tuntutan zaman. Serta memberikan kesempatan kepada sekolah: Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa dan orang tua siswa dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dari rumah atau pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di SDN Karangrejo 02 sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Peran birokrasi disini ditentukan oleh serangkaian tugas dan pekerjaan ke dalam posisi jabatan dalam suatu organisasi. Di dalam sekolah jabatan Kepala Sekolah, guru dan siswa sangatlah penting untuk dapat merinci dan menetapkan perilaku yang tepat. Peran kepala sekolah mendorong para guru dan tenaga kependidikan untuk memahami ilmu pengetahuan dan teknologi di masa pandemi. Selain itu seorang guru memiliki kewajiban untuk merancang pembelajaran sebaik dan semenarik mungkin sesuai dengan rencana awal pembelajaran dan harus mampu melibatkan siswa dengan cara yang efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk melihat bagaimana kebijakan pengelolaan pembelajaran pendidikan dasar masa pandemi *Covid-19* (Studi Kasus di SDN Karangrejo 02 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember) maka dapat ditarik kesimpulan:

Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara legal telah diberlakukan dalam dunia pendidikan pada masa pandemi virus Corona Disease (*Covid 19*). Implementasi kebijakan PJJ di SDN Karangrejo 2 ini dapat diamati dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Terkait dimensi komunikasi dalam PJJ yaitu adanya pola interaksi dua arah (*two way communication*) antara guru, tenaga kependidikan, siswa dan orang tua secara terencana, sistematis dan terukur dengan penggunaan teknologi berbasis IT. Oleh karena itu, perlu ditinjau ulang dalam memberikan PJJ baik dari metode, strategi dan teknik pembelajaran dengan pemilihan media komunikasi yang tepat. Dimensi disposisi dapat dilihat dari kesadaran para pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana dalam penyelenggaran PJJ. Terlepas dari problematika sulitnya mendapatkan kuota, sinyal/jaringan dan kurangnya pengetahuan teknologi yang dihadapi baik oleh guru maupun siswanya, sejatinya membutuhkan peran serta bersama baik antar pemerintah pusat, pemerintah daerah serta orang tua untuk dapat memecahkan masalah yang terjadi di lapangan.

Dimensi sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya termasuk sarana dan prasarana dalam penyelenggaran PJJ belum sepenuhnya mendukung PJJ. Seluruh stakeholder dalam dunia pendidikan termasuk guru, siswa maupun orang tua harus benar-benar disiapkan melalui berbagai pelatihan. Sehingga memiliki kemampuan untuk mengikuti berbagai perubahan dalam PJJ tersebut. Dimensi struktur birokrasi dengan memberikan kesempatan kepada level sekolah: kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa dan orang tua siswa dalam melaksanakan PJJ sudah dilakukan di SDN Karangrejo 2 sesuai dengan pedoman penyelenggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Pengantar Kebijakan Publik. Malang : UMM Press.
- Ainur Risalah, W Ibad, L Maghfiroh, M I Azza, S A Cahyani, & Z A Ulfayati. (2020). Dampak Pandemi *Covid19* Terhadap Kegiatan Belajar Mengajar Di MI/SD (Studi KBM Berbasis Daring Bagi Guru dan Siswa). *JIEES : Journal of Islamic Education at Elementary School*, 1(1), 10–16. <https://doi.org/10.47400/jiees.v1i1.5>.
- Handayani, L. S., & Zulaikhah, Z. (2020). Analisis Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pembelajaran Daring Bagi Guru Di Era New Normal. *AULADUNA: Jurnal Dasar Islam*, 7(2), 176. <https://doi.org/10.24252/10.24252/auladuna.v7i2a7.2020>
- Kusnandar, I. (2012). Analisis Kebijakan Publik. Multazam.
- Minsih, Jatin Sri Nandang, W. K. (2021). *Covid-19*, Problematika Pembelajaran Online Bagi Anak Studi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pembelajaran Daring Bagi Siswa Sekolah Dasar di Era New Normal Pada Masa Pandemi *Covid-19* – Hermanto, Arita Marini, Mohamad Syarif Sumantri DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.936>
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Press.
- Nur Latifah, A. S. (2020). Analisis Attention Siswa Sekolah Dasar Dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi *Covid-19*. *Jurnal Basicedu*, 3(2), 524–532. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.887>
- Nuryatin, S. (2020). Adaptasi Metode Pembelajaran Melalui E-Learning Untuk Menghadapi Era New Normal. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21(1), 1–9.
- Nugroho, D, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Saboowala, R., & Manghirmalani-Mishra, P. (2020). Perception of In-Service Teachers Towards Blended Learning as the New Normal in Teaching-Learning Process Post *COVID-19* Pandemic. *Research Square*, 1–16
- Syarifudin, A. S. (2020). Impelementasi Pembelajaran Daring Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Sebagai Dampak Diterapkannya Social Distancing. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Metalingua*, 5(1), 31–34. <https://doi.org/10.21107/metalingua.v5i1.7072>
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.

Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona virus Disease (*Covid-19*)

Surat Edaran Bupati Jember no surat 420/686/310/2020 perihal Kebijakan Pendidikan Dalam masa Darurat penyebaran *Covid-19*.